

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perencanaan merupakan peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan. Perencanaan juga yang menjadi tolak ukur keberhasilan proses pembangunan yang dilakukan, dengan adanya perencanaan yang baik maka proses pembangunan akan terarah menuju tujuan yang akan dicapai. Meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) ditingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), merupakan salah satu upaya dari pembangunan. Selain itu, tujuan dari upaya pembangunan nasional pemerintah Indonesia juga adalah untuk menjadikan masyarakat yang adil dan makmur.

Menjadikan masyarakat yang adil dan makmur adalah tujuan dari upaya pembangunan nasional pemerintah Indonesia. Dari tujuan tersebut, bermacam kegiatan pembangunan telah difokuskan pada daerah dengan angka kemiskinan yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data berikut ini:

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi
Banten (Ribu Jiwa) 2011-2019

Kab/kota	2011	2012	2013	2014	2015	2017	2018	2019
Kab. Pandeglang	117.60	109.10	121.10	113.14	124.42	117.31	116.16	114.09
Kab. Lebak	115.20	106.90	118.60	115.83	126.42	111.08	108.81	107.93
Kab.Tangerang	188.60	176.00	183.90	173.10	191.12	191.62	190.05	193.97
Kab.Serang	82.00	76.10	72.80	71.38	74.85	69.10	64.46	61.54
Kota Tangerang	114.30	106.50	103.10	98.76	102.56	105.34	103.49	98.37
Kota Cilegon	15.40	15.00	15.90	15.53	16.96	14.98	13.96	13.20
Kota Serang	37.40	34.70	36.70	36.18	40.19	36.97	36.21	36.21
Kota Tangerang Selatan	20.10	18.70	25.40	25.29	25.89	28.73	28.21	29.16
Provinsi Bnten	690.90	642.90	677.50	649.19	702.40	675.04	661.36	654.46

Sumber: BPS <http://banten.bps.go.id>.

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwasanya jumlah penduduk miskin di setiap Kabupaten cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah Penduduk miskin di perkotaan, hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten di Provinsi Banten sangat membutuhkan pembangunan secara bertahap, professional dan berkelanjutan.

Pembangunan harus dipahami sebagai suatu proses multidimensi yang melibatkan perubahan-perubahan dalam struktur, sikap dan faktor kelembagaan, juga percepatan pertumbuhan ekonomi, pengangguran ketidakadilan dan

penghapusan kemiskinan absolut.¹ Kemiskinan merupakan masalah yang sangat sering terjadi di Negara berkembang seperti Indonesia, dan pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketimpangan yang besar dalam distribusi pendapatan (kesenjangan ekonomi) dan tingkat kemiskinan merupakan dua masalah besar dibanyak Negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia. Dikatakan besar, jika dua masalah ini berlarut-latut dan dibiarkan semakin parah, pada akhirnya akan menimbulkan konsekuensi politik dan sosial yang sangat serius.²

Menurut world bank 2014 salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (acceptable).³

¹ Michael P. Todaro, *Ekonomi Untuk Negara-Negara Berkembang, Suatu Pengantar Tentang Prinsip-Prinsip, Masalah dan Kebijakan Pembangunan, Edisi Ketiga*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 142

² Tulus T.H Tambunan, *Perekonomian Indonesia Kajian Teoritis Dan Analisis Empiris*, (Bogor; Ghalia Indonesia, 2014), h. 181

³ Kusworo, Indah Giyanti Permata Dewi , “*Analisis Tingkat Pendidikan, PDRB, dan Upah Minimum Regional Terhadap Kemiskinan Di*

Selain kemiskinan yang menjadi masalah utama, negara berkembang juga dihadapkan dengan adanya keterbatasan lapangan pekerjaan. Hal itu membuat banyak masyarakat Negara berkembang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja, yang biasa disebut sebagai pengangguran. Ida Bagoes mantra berpendapat bahwa pengangguran adalah bagian dari angkatan kerja yang sekarang ini tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan, konsep ini sering diartikan sebagai keadaan pengangguran terbuka.

Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka itu sendiri adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.⁴ Berdasarkan data berikut ini:

Tabel 1.2
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten di Provinsi Banten

Kab. Di Provinsi Banten	2011	2012	2013	2014	2015	2017	2018	2019
Kab. Pandeglang	11.32	9.30	12.34	7.03	10.22	8.30	8.33	8.71
Kab. Lebak	12.10	9.07	7.23	9.57	10.74	8.88	7.69	8.05
Kab. Tangerang	14.42	11.46	11.94	8.45	9.00	10.57	9.70	8.91
Kab. Serang	13.29	12.96	13.69	14.76	14.80	13.00	12.77	10.65

Sumber: BPS <http://pandeglangkab.bps.go.id>.

Provinsi Banten” Vol. 6, No 1 (April 2016) Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, h. 19

⁴ “ Tenaga Kerja” <http://pandeglangkab.bps.go.id>, diakses pada 07 Januari, 2020, pukul 13.00 WIB

Berdasarkan data di atas Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten se- Provinsi Banten mengalami fluktuasi disetiap tahunnya,.

Dalam pembangunan ekonomi Indonesia, kesempatan kerja masih menjadi masalah utama. Pokok dari permasalahan ini diakibatkan adanya kesenjangan antara pertumbuhan jumlah tenaga kerja dengan ketersediaan lapangan pekerjaan diberbagai sektor ekonomi. Ketimpangan antara ketersediaan lapangan kerja dengan banyaknya tenaga kerja yang ada berdampak pada masalah baru yang juga dihadapi Negara-negara berkembang termasuk Indonesia yaitu masalah tingkat pengangguran yang tinggi.⁵

Pertambahan penduduk yang semakin pesat dan semakin besar jumlahnya di Negara-negara berkembang menyebabkan masalah pengangguran menjadi bertambah memburuk. Masalah ini merumitkan corak masalah dan hambatan pembangunan yang

⁵ Muhammad Burhanudin, *“Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Banten Tahun 2008-2013”*, (Skripsi, Jurusan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), h. 1 <http://repository.uinjkt.ac.id>, diunduh pada 27 oktober 2019

harus dihadapi dalam usaha mempercepat pembangunan ekonomi di Negara-negara berkembang.⁶

Tingkat pengangguran yang tinggi kebanyakan terjadi dikalangan anak-anak muda dan mereka yang telah lebih berpendidikan pada usia 15 sampai dengan 24 tahun. Bahkan lebih banyak lagi angkatan kerja di kota maupun di desa yang merupakan pengangguran-pengangguran tersamar. Mereka tidak memiliki baik sumber-sumber daya tambahan (kalau mereka bekerja purna waktu) maupun kesempatan-kesempatan lain (kalau mereka bekerja paro waktu) untuk meningkatkan pendapatan mereka yang masih rendah yang tidak sebanding dengan kalau mereka bekerja di sektor manufaktur modern, perdagangan ataupun sektor jasa.⁷

Ketika membicarakan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah juga bisa menjadi salah satu tolak ukur kesejahteraan masyarakat. Produk domestik regional bruto

⁶ Sadono Sukirno, "*Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah, Dan Dasar Kebijaksanaan*", (Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI dengan Bima Grafika, 1985,) h 187

⁷ Michael P. Todaro, "*Ekonomi Untuk Negara-Negara Berkembang, Suatu Pengantar Tentang Prinsip-Prinsip, Masalah Dan Kebijakan Pembangunan, Edisi Ketiga*", (Jakarta, bumi aksara, 1995), h. 298

(PDRB) Provinsi digunakan untuk mengetahui lebih jelas tentang pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. PDRB juga merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam memanfaatkan sumberdaya yang ada yang akan digunakan sebagai perencanaan yang dapat mengurangi kemiskinan.

Pertumbuhan dan kemiskinan memiliki korelasi yang sangat kuat karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang.

Sampai akhir tahun 1960 para ahli ekonomi percaya bahwa cara terbaik untuk mengejar keterbelakangan ekonomi adalah dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya, sehingga dapat melampaui tingkat pertumbuhan penduduk.⁸

⁸ Dio Syahryullah, "*Analisis Pengaruh Produk Domestic Regional Bruto (PDRB), Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten Tahun 2009-2012*" Skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014) h.7 <http://repository.uinjkt.ac.id> diunduh pada 01 November 2019

Perbedaan angka kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten yang cukup besar, dilihat dari data yang telah dipaparkan di atas. Agar bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat dalam mengurangi angka kemiskinan Kabupaten di Provinsi Banten perlu dilakukannya analisa kembali tentang kemiskinan di Kabupaten Se-Provinsi Banten terutama faktor-faktor (PDRB, dan pengangguran). Jika permasalahan kemiskinan ini tidak cepat ditangani menggunakan kebijakan-kebijakan yang tepat akan menimbulkan permasalahan sosial daerah Provinsi Banten.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya maka penulis tertarik untuk mengetahui dan memahami lebih jauh seputar masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Kabupaten Se-Provinsi Banten Periode 2011-2019”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Dalam tingkat pertumbuhan ekonomi harus diperhatikan sudah sejauh mana penyebaran distribusi pendapatan di seluruh lapisan masyarakat, karena penyebaran distribusi pendapatan merupakan salah satu indikator yang menentukan penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat kesejahteraan masyarakat.
2. Kurangnya lapangan pekerjaan salah satu penyebab banyaknya pengangguran yang menyebabkan sulitnya memenuhi kebutuhan hidup, dan menyebabkan kemiskinan semakin meningkat
3. Sesuai dengan keadaan di Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Kabupaten yang ada di Provinsi Banten, memiliki angka jumlah penduduk miskin yang tinggi dibandingkan dengan angka di perkotaan, begitu pun dengan Tingkat Pengangguran Terbuka dan laju pertumbuhan PDRB yang mengalami fluktuasi di setiap tahunnya .

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah ini bertujuan agar pembahasan tidak meluas maka penulis membatasi penulisan hanya yang terkait pada permasalahan Tingkat Pengangguran Terbuka, PDRB dan Penduduk Miskin di Kabupaten Se-Provinsi Banten tahun 2011-2019, kecuali data pada tahun 2016 tidak dicantumkan karena karena data Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2016 tidak tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten.

D. Rumusan masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka dan PDRB terhadap Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Se-Provinsi Banten?
2. Bagaimana pandangan ekonomi syariah mengenai jumlah penduduk miskin?

E. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat pengangguran terbuka dan PDRB terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Se-Provinsi Banten.
2. Untuk mengetahui pandangan ekonomi syariah mengenai jumlah penduduk miskin

F. Manfaat penelitian

Manfaat yang akan dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan salah satu sarana pembelajaran untuk memperdalam pengetahuan mengenai pengaruh tingkat Pengangguran Terbuka dan Produk Domestic Regional Bruto (PDRB) terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Se-Provinsi Banten

2. Bagi Instansi dan Pemerintahan

Penulis berharap bisa memberikan informasi yang berguna kepada pemerintah dalam mempertimbangkan

kebijakan-kebijakan yang akan diambil untuk memajukan pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia

3. Bagi Perguruan Tinggi

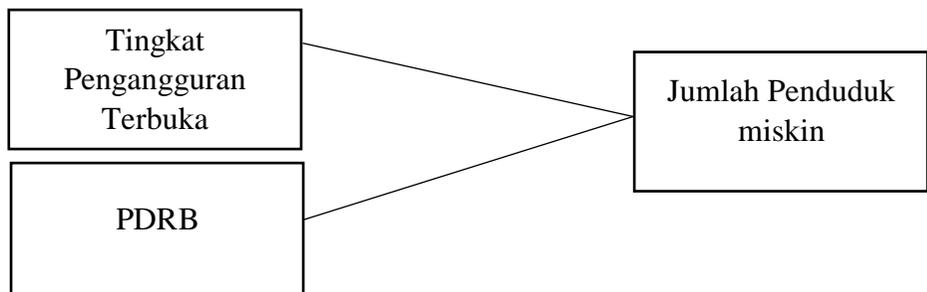
Penulis juga berharap untuk memberikan wawasan yang berguna untuk para pembaca dan peneliti selanjutnya di bidang ekonomi syariah fakultas ekonomi dan bisnis islam UIN “SMH BANTEN” tentang Tingkat Pengangguran Terbuka, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan jumlah penduduk miskin

G. Kerangka pemikiran

Pembangunan ekonomi sangat mempengaruhi kemiskinan di suatu wilayah, seperti indikator pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari produk domestik regional bruto (PDRB), dan jumlah pengangguran juga dapat berpengaruh terhadap kemiskinan karena ketika kondisi masyarakat tidak memiliki pekerjaan maka mereka akan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena mereka tidak memiliki penghasilan, yang menyebabkan bertambahnya kemiskinan, disuatu wilayah.

Dari konsep diatas maka dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 1.1
Kerangka pemikiran



Gambar 1.1 tersebut menjelaskan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka memiliki pengaruh positif terhadap penduduk miskin, ketika Tingkat Pengangguran Terbuka menurun maka jumlah penduduk miskin juga akan menurun, begitupun dengan laju PDRB ketika laju PDRB naik maka penduduk miskin akan menurun.

H. Sistematika pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, dan sistematika pembahasan sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan, latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, sistematika penulisan.
- BAB II : Tinjauan Pustaka yang meliputi landasan teori, hasil-hasil penelitian relevan, hipotesis penelitian.
- BAB III : Metodologi penelitian yang meliputi, tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data.
- BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan meliputi gambaran umum, lokasi penelitian, pembahasan hasil penelitian.
- BAB V : Penutup yang menyajikan kesimpulan dan saran dari penulis yang didasarkan hasil penelitian yang diperoleh.